BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan yaitu, DPR, DPRD, provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Setelah Amandemen ke empat UUD 1945 pada 2009. pemilihan Presiden dan wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR,di sepakati untuk dilaksanakan langsung oleh rakyat sehingga pilpres dimasukan dalam lazim pemilu.[1]

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia menganut asas "luber" yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas dan rahasia "asas luber" sudah ada sejak Orde Baru. Dalam perundang-undangan diuraikan pengertian sebagai berikut:

a. Langsung artinya rakyat memilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.
b. Umum artinya semua warga negara yang mempunyai semua persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 Tahun atau lebih atau belum berumur 17 Tahun tapi sudah/pernah menikah berhak ikut memilih dalam pemilihan dan yang telah berumur 21 Tahun berhak dipilih, dengan tidak dibeda-bedakan.

[1] http://www.id.wikipedia.org/wiki/pemilih.umum.07-05-09

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bebas artinya setiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan sesuai dengan hati nuraninya tanpa adanya pengaruh.

d. Rahasia artinya pemilihan dijamin oleh peraturan dan tidak akan diketaui oleh pihak siapa pun dangan jalan apapun yang dipilihnya.[2]

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan dari "jujur dan adil". Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih dengan sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang mengistimewakan atau pun diskriminasi terhadap peserta atau pemilu tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih atau pun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggaraan pemilu.[3]

Dalam pemilu, para pemilih dalam pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan di mulai, pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta dan disosialisasikan kepada pemilih.

---

[2] Parulian Donald "*Menggugat Pemilu*".(Jakarta : PT Sinar Harapan, 1997), h.43-44
[3] http://www.id.wikipedia.org/wiki/pemilihan.umum.di.Indonesia.07-05-09

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pemilu legislatif 2009, terdapat 38 partai nasional dan 6 partai nasional dan 6 partai lokal yang disahkan oleh komisi pemilihan umum atau KPU. Hal ini dimaksudkan agar dapat terwujudnya demokrasi di Indonesia, jadi dengan begitu banyak partai, begitu banyak caleg, begitu banyak warna warni janji-janji politik. Seharusnya rakyat dapat menentukan pilihan kepada partai yang tepat.

Akan tetapi juga merupakan peserta demokrasi dinegara Indonesia dimana dalam pemilu tersebut rakyat menggunakan hak pilih atau suara mereka untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk dikursi pemerintahan. Pada tanggal 9 April 2009 adalah pesta demokrasi di negara Indonesia berlangsung dimana pada tanggal tersebut diadakan pemilihan Calon Anggota Legeslatif (Caleg), calon anggota legeslatif adalah orang atau wakil rakyat yang akan duduk dikursi pemerintahan yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat.

Caleg adalah seseorang yang telah memenuhi syarat baik individu maupun melalui partai politik, yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif. Anggota legislatif adalah orang yang tugasnya membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan demi kemaslahatan masyarakat.

Semakin banyaknya jumlah partai politik di Indonesia menimbulkan semakin banyaknya jumlah Caleg (Calon Legeslatif) yang berebut kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI maupun DPRD ataupun DPD, calon anggota legeslatif dari berbagai macam partai politik berlomba-lomba dengan menggunakan berbagai macam setrtegi untuk menarik simpati masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga calon legeslatif tersebut akan memperoleh suara dengan jumlah yang banyak. Yang akan menentukan apakah calon legeslatif tesebut mampu menduduki kursi pemerintahan.

Ada juga dengan penetapan suara terbanyak untuk menetapkan calon legeslatif terpilih pada pemilu legislatif 2009 ini, maka tentunya para caleg harus bekerja keras untuk memperoleh simpati dari masyarakat. berbagai macam carapun dilakukan yaitu dengan pemasangan sepanduk, berbagai kartu nama/stiker dan ada pula dengan menggunakan cara-cara kotor seperti pemberian uang (*money politic*).

Hal tersebut juga di desa Raci Wetan, yang mana para aparatur desa tergiur dengan janji seorang calon legelatif untuk memperbaiki jalan desa Raci Wetan yang rusak parah jika dia terpilih menjadi anggota legeslatif. Oleh karena itu para aparatur desa mempengarui warga Raci Wetan untuk memilih calon legeslatif tersebut. Bahkan para aparatur desa Raci Wetan melakukan silaturahmi dari satu rumah kerumah yang lain (*door to door*) untuk mempromosikan calon anggota legislatif tersebut.

Masyarakat sebagai subyek dan obyek yang memiliki hak pilih atau suara berhak memilih dan menentukan siapa yang akan mereka pilih dan akan menentukan siapa yang akan mereka pilih. Ternyata persaingan para calon anggota legeslatif menimbulkan masalah para pendukungnya, persaingan tersebut memicu terjadinya konflik dimasyarakat antara pemuda dan aparat desa. Dimana aparat desa Raci Wetan tersebut tidak disetujui oleh para pemuda karena para pemuda desa Raci Wetan mendukung calon anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

legeslatif dari partai politik yang lain. Akhirnya perberbedaan pendapat tersebut menjadi konflik antara aparatur desa dengan para pemuda di desa Raci Wetan.

Konflik sosial adalah pertentangan sosial yang bertujuan untuk mengurai atau menghancurkan kegiatan dari suatu kelompok yang menghalangi atau menghancurkan kelompok lain, walaupun hal itu tidak menjadi tujuan utama aktifitas kelompok pertama.

Masyarakat Desa Raci Wetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik merupakan masyarakat tradisional, artinya : kebanyakan dari mereka masih berpendidikan rendah, dan status ekonominya masih berada pada garis menengah kebawah selain itu cara berpakaian masih lugu atau belum modern dan kehidupannya masih tergantung pada agraria sehingga di desa ini sering terjadi konflik, salah satunya yaitu pada pemilu 2009, yang mana dari tingkat pendidikan yang rendah mereka tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi dimana dalam menentukan pilihan partai politiknya mereka masih mengikuti pilihan tokoh-tokoh agama kelompok masyarakat yang menjadi komunitas dakwahnya, seorang hampir dapat dipastikan selalu mengikuti pilihan partai politik tokohnya.

B. Rumusan Masalah

Dari ulasan diatas peneliti memfokuskan penelitiannya pada:

1. Apa yang melatar belakangi faktor-faktor yang terjadinya konflik sosial pasca pemilu legislatif 2009 di desa Raci Wetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana bentuk-bentuk konflik sosial pasca pemilu legislatif 2009 di desa Raci Wetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Ingin mengetahui apa yang melatar belakangi terjadinya konflik sosial pasca pemilu legislatif 2009 di Desa Raci Wetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk konflik sosial pasca pemilu legislatif 2009 di desa Raci Wetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menyelesaikan program S-1 Progaram Studi Sosiologi Fakultas Dakwa, dan dengan penelitian ini akan memberikan pengalaman praktisi dari sebuah teori yang telah dikaji selama penelitian, kiranya dapat dijadikan bahan sekaligus tambahan ilmu untuk mempersiapkan diri tujuan dimasyarakat
2. Bagi masyarakat luas pada umumnya, dan khususnya bagi masyarakat Raci Wetan Bungah, Gresik dapat memberikan masukan dan juga sebagi kenangan sekaligus pandangan baru tentang bagaimana terjadinya konflik antara pemuda dan aparatur desa serta dapat mengetahui bagaimana masyarakat menanggapi hal tersebut.
3. Bagi kami sebagai mahasiswa dan peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan sosial serta dijadiakan dasar pandangan teori dan bahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan untuk mengadakan penelitian sejenis yang berkaitan dengan sosiologi politik.

E. Definisi Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi maupun kesimpang siuran pembahasan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan konsep teoritis tentang judul yang diangkat dalam penelitian ini. Yaitu anara lain:

1. Konflik adalah hal yang bermoral karena hal yang normal ialah keselarasan. Konflik sebenarnya hanyalah suatu perbedaan atau salah paham.

   Definisi lain dari konflik adalah :

   a. Suatu kondisi dimana tujuan, kebutuhan dan nilai-nilai kelompok yang bersaing, bertabrakan dan akibatnya terjadilah agresi walaupun belum tentu berbentuk kekerasan (*schelling*).
   b. Suatu yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang antara beberapa orang, kelaompok organisasi.
   c. Sikap saling mempertahan kan diri sekurang-kurangnya di antara dua kelompok yaitu memiliki tujuan dan pandangan berbeda delam upaya mencapai tujuan sehingga mereka berada dalam posisi oposisi kerjasama.[4]

[4] http://www.Shvoong.com.id/social-sciences/1838186makna-konflik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemilu legislatif

Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilu memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan di sini beraneka ragam mulai dari Presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan sampai Kepala Desa. Walaupun ini kata pemilihan lebih sering digunakan sistem pemilu adalah asas "luber dan jurdil". Pemilu legislatif merupakan persta demokrasi yang menjadi momentum bagi pemilih yang sudah punya hak pilih untuk memilih calon-calon, wakli rakyat yang tugasnya untuk mendengar, membela dan melayani aspirasi rakyat yang memilihnya. Di Indonesia anggota legislatif berkedudukan mulai tingkat pusat, propinsi dan kota/kabupaten.[5]

Pemilihan umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem proposional berdasarkan *Stelselt* daftar untuk pemilih anggota Majlis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota. Pemberian suara dalam pemilihan umum adalah hak setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih.[6]

Pemilu dibagi menjadi dua segi :

a. Dari segi rakyat pemilu adalah mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada mereka yang hendak memegang kekuasaan di pemerintahan.

---

[5] http://www.id.wikipedia.org/wiki/pemilihan-umum.07-05-2009

[6] Deddy Supriyady Brata Kusuma, Ph.D. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dari segi sisi elit adalah mekanisme penggantian pemegang kekuasaan secara priodik dan tertib.[7]

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang kajian kepustakaan (makro) dan (mikro) berupa landasan teoritis yang berkaitan dengan serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian dan lokasi penelitian, jenis, dan sumber data, tahap-tahap penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data dan tehnik keabsahan data.

BAB IV : PENYAJIAN DATA

Bab ini menjelaskan gambaran umum obyek penelitian, meliputi keadaan geografis, demografi penduduk, keadaan keagamaan, keadaan pendidikan dan jenis mata pencaharian, keadaan sosial

[7] *http//www. Ajrc. Aceh org./file/pelanggaran % 20 pemilu/ pt.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi, dan keadaan kelembagaan masyarakat serta adanya deskriptif (gambaran).

BAB V : ANALISIS DATA

Bab ini membahas tentang deskriptif data yang diperoleh di lapangan penelitian sesuai dengan kasus permasalahan dan menganalisa dengan prespektif teori sosiologi yang ada.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian laporan yang berisi kesimpulan dan saran-saran (rekomondasi).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id